

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL PADA
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**



SKRIPSI

**Oleh:
ALAMANTO JAYADI R
105730423213**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Almanto Jayadi R

Stambuk : 105730423213

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, pada Hari Senin, 12 Februari 2018.

Makassar, 14 Februari 2018

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA
NBM : 003 0728



Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA
NBM : 1073428

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini telah di sahkan oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan No. 0017 / 2018 Tahun 1439 H/ 2018 M yang di pertahankan di depan tim penguji pada hari Senin, 12 Februari 2018 M sebagai persyaratan guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (SE)** oleh **Almanto Jayadi R** Nim **105730423213** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Februari 2018

Panitia Ujian :

Pengawasan Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE,MM
(Rektor Unismuh Makassar)

Optrol.
(.....)

Ketua : Ismail Rasulong, SE,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

(.....)

Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

(.....)

Penguji : 1. Drs. H. Sultan Sarda, MM
2. Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA
3. Samsul Rizal, SE, MM
4. Drs. Hamzah Limpo, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE, MM
NIM : 903 078

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ENREKANG

ALMANTO JAYADI R
105730423213

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional Berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional Berbasis Akrual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama dibidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang berupa Laporan Operasional untuk tahun anggaran 2015 dan 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif (Deskriptive Analisis Method) yaitu suatu metode yang menggambarkan terlebih dahulu mengenai pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan dan beban pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang kemudian disesuaikan dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional Berbasis Akrual

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAP No. 12. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan dan beban dalam penyusunan Laporan Operasional telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang berbasis akrual.

Kata kunci : Pendapatan - LO, Beban - LO

KATA PENGANTAR



Assalamuallaikum Wr. Wb.

Tiada untaian kata yang paling indah selain Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, karena berkah dan limpahan Rahmat - Nya jualah sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini dengan baik. Tidak lupa salam dan sholawat tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna akhlak umat manusia dan pembawa kabar bahagia bagi orang-orang yang beriman.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul penulisan skripsi ini adalah; **“Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang”**.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tuaku, Terkhusus kepada Ibunda **Innung** tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, memberikan motivasi dan doa dengan keikhlasan dan kesabaran yang tak ternilai oleh apapun juga di dunia ini, sejak penulis kecil, sekolah, memasuki bangku kuliah hingga penyelesaian skripsi ini. Juga kepada sodara kakak saya Rusdianto R dan adik-adik saya, Angriani

Lestari R dan Ardiansyah. Serta kepada Sahabat BEDIPERS dan Keluarga MASSAMPU terima kasih atas dukungannya selama ini kepada penulis.

Terima kasih juga penulis ucapkan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Dr.H.Abd Rahman Rahim,SE.,MM** selaku Pembimbing I dan Bapak **Ismail Badollahi,SE.,M.Si.AK.CA** selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan hasil penelitian.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis senantiasa mengalami kesulitan-kesulitan, namun semuanya dapat teratasi berkat adanya bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr.H.Abd Rahman Rahim,SE.,MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,
2. Bapak **Ismail Rasulong,SE.,MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
3. Bapak **Ismail Badollahi,SE.,M.Si.AK.CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi,
4. Ibu **Muchhiana muchran,SE.,M.Si.AK.CA** selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
6. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu, **Rusdin** dan **Innung** atas doa, dukungan dan kasih sayangnya yang tiada tara, semoga ALLAH SWT selalu melindungi beliu,

7. Sodara kakak **Rusdianto R** dan adik-adik saya, **Angriani Lestari R** dan **Ardiansyah** serta seluruh keluarga tercinta yang selalu ada untuk memberi bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dan seluruh pegawai lingkup DPKAD Kabupaten Enrekang yang telah membantu demi kelancaran pelaksanaan penelitian,
9. Sahabat dan teman seperjuangan dalam suka dan duka, sahabat BEDIPERS, Keluarga MASSAMPU dan warga HPMM Kom.UNISMUH serta teman-teman semua yang selama ini berbagi canda tawa, motivasi dan semangat juang dalam berproses menggapai impian.
10. Keluarga HIMANSI angkatan 2013 serta senior dan junior Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar terimah kasih atas dukungannya,
11. Almamaterku,
12. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masihlah jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Allahumma amin.

Makassar, oktober 2017

Almanto Jayadi R

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Asumsi Dasar Laporan Keuangan Pemerintah.....	7
B. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	8
C. Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintah	12

D. Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
E. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
F. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12	25
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
H. Kerangka Fikir	35
I. Hipotesis	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Dan Sumber Data	39
C. Metode Pengumpulan Data	40
D. Metode Analisis Data	40
E. Definisi Operasional	41

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
Daerah Kabupaten Enrekang	43
B. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kabupaten Enrekang	46

C. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
Daerah	49
D. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola	
Keuangan dan Aset Daerah	50

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian Penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56
2. Akuntansi Pendapatan-LO Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	57
3. Pengakuan Pendapatan-LO	61
4. Pelaporan Pendapatan-LO	62
5. Pencatatan Beban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	62
6. Pengakuan Beban	65
7. Pelaporan Beban	67
8. Pihak dan Dokumen yang terkait dengan Akuntansi Beban	67

B. Pembahasan Hasil Penyusunan Laporan Operasional pada

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. Proses Penyusunan Laporan Operasional 68
2. Pencatatan Pendapatan-LO dan Beban 71
3. Pengakuan Pendapatan-LO dan Beban 73

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing pemerintah daerah diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih dengan adanya otonomi daerah . Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dibidang pemerintahan, termasuk dibidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya.oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu mengembangkan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaran pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ini, menggunakan Basis Cash Toward Acrual (Kas Menuju Akrua), dimana Laporan Realisasi Anggaran yang berisi pendapatan dan belanja disajikan dengan basis kas, sedangkan laporan neraca yang berisi aset, ekuitas dana dan kewajiban disusun dengan menggunakan basis akrual. Penggunaan basis kas menuju akrual ini hanya berlaku sampai pada pertanggung jawaban untuk tahun anggaran 2014.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 selaku pengganti/ penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Akuntansi Berbasis AkruaI merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas/ setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam peraturan ini, bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas penggunaan anggaran selama periode tertentu disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 36 ayat (1), mengamanatkan penggunaan Berbasis AkruaI dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”.

Akuntansi Berbasis AkruaI merupakan suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Fokus sistem akuntansi ini

pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya suatu entitas. Dalam akuntansi berbasis akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban.

Fenomena terakhir terkait dengan pertanggung jawaban APBD oleh entitas peloporan dan entitas akuntansi adalah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini mengamanatkan bahwa entitas akuntansi tidak hanya membuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan dan Catatan atas laporan Keuangan, tetapi juga harus menyajikan Laporan operasional dan Laporan Perubahan ekuitas.

Laporan operasional menyajikan ihtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas yang dikelola oleh SKPD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Jika dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kejadian atau transaksi hanya dicatat apabila kas telah diterima atau dibayarkan, maka pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan kejadian atau transaksi dicatat pada periode terjadinya. Pencatatan transaksi ini akan diihtisarkan menjadi sebuah laporan keuangan berupa laporan operasional. Penyusunan laporan operasional ini dilakukan oleh semua SKPD, tak terkecuali Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.

Hal yang menarik juga terkait permasalahan mengenai Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Karim (2015) yang relevan dan dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian ini adalah dengan judul “Penilaian Kinerja dalam Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik pada Pemerintah Kabupaten

Enrekang”, dengan hasil penelitian bahwa upaya pemerintah kabupaten Enrekang dalam mengelola keuangan daerah berbasis program satu atap dan kegiatan unit kerja dan berorientasi pada peningkatan daya guna dan hasil tepat guna pada semua sektor penerimaan sudah berjalan optimal. Namun masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, masalah ketidak seimbangan antara pendapatan dan belanja daerah di sebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah kabupaten Enrekang dalam menentukan pos-pos pendapatan strategi berdasarkan potensi keunggulan yang dimiliki oleh daerah serta ketidakmampuan dalam memprioritaskan pembelanjaan daerah sehingga hal itu kemudian yang perlu dibenahi dan dicarikan solusi yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan Abdul Karim dengan penelitian ini adalah penelitian Abdul Karim mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan basis kas menuju akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005). Sedangkan penelitian ini yang akan dilakukan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Sesuai dengan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berupa “ **Analisis Penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang ingin di jawab dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAP No.12 yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Berbasis Akrual ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAP No.12 yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Berbasis Akrual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah secara praktis dan teoritis.

a. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi strata 1 jurusan akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar, sekaligus menambah pengetahuan dan implementasi teori-teori yang didapat selama perkuliahan.

2. Bagi pemerintah daerah dapat digunakan sebagai rujukan khususnya dalam penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Manfaat Teoritis

1. Bagi pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama dibidang Akuntansi Sektor Publik yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang lebih luas dari bahasan ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah. Untuk itu, penelitian ini dibatasi pada penyusunan Laporan Operasional pada tahun anggaran 2015 pada Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Asumsi Dasar Laporan Keuangan Pemerintah

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Unit pemerintah daerah, baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang ditetapkan.

2. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi dan entitas akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian, pemerintah

diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan jangka pendek.

3. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

B. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 01 – Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas

Erlina (2013:9) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran yang normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi dikatakan relevan jika memenuhi kriteria dibawah ini :

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

b. Dapat Diverifikasi(*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya (andal) maka penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan secara menyeluru.

3. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut terhadap pengambilan

keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

C. Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Ratmono(2015:12). Meskipun ada dua basis akuntansi yaitu kas (LRA) dan akrual (LO dan Neraca), namun hanya satu persamaan akuntansi yang digunakan. Karena unsur ekuitas terbentuk dari transaksi kas (realisasi anggaran) dan transaksi yang bersifat akrual. Sehingga persamaan yang digunakan untuk dasar pencatatan adalah

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas} + (\text{Pendapatan} - \text{LO} - \text{Beban})$$

Persamaan akuntansi ini digunakan dalam basis akrual akan menghasilkan Laporan Operasional.

D. Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian

dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Menurut Erlina (2013:20) laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dengan demikian, yang di maksud Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Yang dimaksud dengan transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan pemerintah diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kreditor, Donatur, Analisis Ekonomi dan Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Pusat.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintah daerah itu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, tranfer, pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah.

Laporan keuangan daerah bermanfaat untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, karena laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberi informasi sebagai berikut :

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan-undangan.
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman.

- e. Perubahan posisi keuangan pelaporan, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

E. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Negara/Daerah yang menguasai saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk perimbangan dan bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimasukkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
- d. Koneksi Kesalahan Tahun Sebelumnya
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

- a. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
- b. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Setiap entitas akuntansi/ pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek
- h. Kewajiban jangka panjang
- i. Ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Beban dari kegiatan operasional. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- c. Transfer adalah pengeluaran atau kewajiban pengeluaran uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, bila ada
- e. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- f. Surplus/defisit –LO, dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional entitas pelaporan harus dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambah pos-pos pada pelaporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi yang dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut ini:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya ;
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - 2. Perubahan aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

6. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transaksi yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang di cakup dalam laporan Arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Neraga/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Tujuan pelaporan arus kas ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal

pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan non anggaran/ transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan nonanggaran/ transitoris.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan arus Kas. Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan untuk digunakan dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Format catatan atas laporan keuangan SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Format Catatan Atas Laporan Keuangan
SKPD
PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN	
Bab 1	Pendahuluan
	1.1 maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab 11	EkonomiMakro, KebijakanKeuangedanPencapaian Target Kinerja APBD SKPD
	2.1 EkonomiMakro/ Ekonomi Regional
	2.2 KebijakanKeuangan
	2.3 IndikatorPencapaian Target Kinerja APBD
Bab 111	IkhtisarPencapaian Target KinerjaKeuangan SKPD
	3.1 Ikhtisarrealisasipencapaian target kinerjakeuangan SKPD
	3.2 Hambatandankendala yang adadalampencapaian target yang telahditetapkan
Bab 1V	KebijakanAkuntansi
	4.1 Entitasakuntansi/ pelaporankeuangedaerah SKPD
	4.2 Basis akuntansi yang mendasaripenyusunanlaporankeuangan SKPD
	4.3 Basis pengukurankeuangan yang mendasaripenyusunanlaporankeuangan SKPD
	4.4 Penerapankebijakanakuntansiberkaitandenganketentuan yang adadalam SAP pada SKPD
Bab V	Penjelasanpos-posLaporanKeuangan SKPD
	5.1 Rinciandaripenjelasanmasing-masingpos-pospelaporankeuangan SKPD
	5.1.1Pendapatan-LRA
	5.1.2Pendapatan-LO
	5.1.3Belanja
	5.1.4Beban
	5.1.5Aset
	5.1.6Kewajiban
	5.1.7Ekuitas
	5.2 Pengungkapaninformasi yang diharuskanPernyataanStandarAkuntansiPemerintahan yang belumdisajikandalamlembarmukalaporankeuangan

Bab V1	Penjelasan atas Informasi-informasi non keuangan
Bab V11	Penutup

Sumber :Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

F. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 atau PSAP 12 adalah pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) tentang laporan operasional. PSAP 12 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

a. Tujuan PSAP Nomor 12

Tujuan PSAP 12 adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

b. Ruang Lingkup PSAP 12

PSAP 12 diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. PSAP 12 berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

c. Manfaat Informasi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

1. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam 7 mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
2. kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*)

sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Struktur dan Isi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

1. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
2. cakupan entitas pelaporan;
3. periode yang dicakup;
4. mata uang pelaporan; dan
5. satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO

2. Beban
3. Surplus/Defisit dari operasi
4. Kegiatan non operasional
5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
6. Pos Luar Biasa
7. Surplus/Defisit-LO

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan subjumlah lainnya apabila diwajibkan oleh PSAP, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

Contoh format Laporan Operasional pemerintah kabupaten/kota dari peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 71 tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut :

Table 2.2
 Contoh Format Laporan Operasional pemerintah kabupaten/kota
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0
 (Dalam Rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan retribusi daerah	XXX	XXX	XXX	XXX

5	Jumlah pendapatan asli daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
6	PENDAPATAN TRANSFER				
7	Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Transfer pemerintah pusat lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
9	Transfer pemerintah provinsi	XXX	XXX	XXX	XXX
10	Jumlah pendapatan transfer	XXX	XXX	XXX	XXX
11	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
12	Pendapatan hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Pendapatan darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Jumlah Pendapatan lainnya yang sah	XXX	XXX	XXX	XXX
15	JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX
16	BEBAN				
17	Beban pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
18	Beban persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Beban perjalanan dinas	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Beban jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
21	Beban bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
22	Beban subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
23	Beban lain-lain	XXX	XXX	XXX	XXX
24	JUMLAH BEBAN	XXX	XXX	XXX	XXX
25					
26	SURPLUS/DEFISIT (pendapatan – beban)	XXX	XXX	XXX	XXX

27	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL				
28	Surplus penjualan asset non lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
29	Surplus penyelesaian kewajiban	XXX	XXX	XXX	XXX
30	Deficit penjualan asset non lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
31	Deficit penyelesaian kewajiban	XXX	XXX	XXX	XXX
32	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX	XXX
33	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	XXX
34	POS LUAR BIASA				
35	Pendapatan luar biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
36	Beban luar biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
37	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX	XXX	XXX

Sumber : *peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 71 tahun 2010*

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian ini adalah Abdul Karim (2015) dengan judul “Penilaian Kinerja dalam Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik pada Pemerintah Kabupaten Enrekang”, dengan hasil penelitian bahwa upaya pemerintah kabupaten Enrekang dalam mengelola keuangan daerah berbasis program satu atap dan kegiatan unit kerja dan berorientasi pada peningkatan daya guna dan hasil tepat guna pada semua sektor penerimaan sudah berjalan optimal. Namun masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, masalah ketidak seimbangan antara pendapatan dan belanja

daerah di sebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah kabupaten Enrekang dalam menentukan pos-pos pendapatan strategi berdasarkan potensi keunggulan yang dimiliki oleh daerah serta ketidakmampuan dalam memprioritaskan pembelanjaan daerah. Dan penelitian yang dilakukan juga oleh Munjiyah(2011) dengan judul Evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Konawe telah menerapkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), namun demikian masih ada kekurangan yang perlu dibenahi khususnya yang terkait dengan penyusunan aset tetap. Perbedaan penelitian Abdul Karim dan Munjiyah dengan penelitian ini adalah penelitian Munjiyah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan basis kas menuju akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2005). Sedangkan penelitian ini yang akan dilakukan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Penelitian sejenis juga di lakukan oleh Jenny (2016) dengan judul “ Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung dan Beban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan teknik studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung telah melakukan proses pencatatan belanja langsung dan beban sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jenny dan penelitian ini adalah objek penelitian Jenny adalah Belanja langsung dan beban, sedangkan penelitian ini adalah laporan operasional.

Table 2.3

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis penelitian	Hasil Penelitian
1	Abdul karim (2015)	Penilaian kinerja dalam akuntabilitas keuangan sector public pada pemerintah kabupaten enrekang	Adapun metode yang digunakan adalah dengan menggunakan komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah; 1. Laporan realisasi anggaran 2. neraca 3. laporan arus kas, dan 4. catatan atas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi sector public belum diterapkan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten enrekang, sehingga akuntabilitas public dan clean government belum tercapai sesuai dengan amanah masyarakat yang tergantung dalam tuntunan reformasi.
2	Munjiyah (2011)	Evaluasi penerapan standar akuntansi pemerintah pada penyusunan laporan keuangan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten konawe	Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan dinas kependudukan dan catatan sipil kab. Konawe telah menerapkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah
3	Jenny (2016)	Analisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung dan beban dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Bitung	Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan teknik studi dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Bitung telah melakukan proses pencatatan belanja langsung dan beban sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
4	Sunanto (2016)	Analisis anggaran operasional sebagai alat pengendalian keuangan pada	Jenis data yang digunakan adalah data laporan realisasi dan anggaran operasional tahun 2011	Hasil penelitian ini menunjukkan penyimpanan anggaran operasional tahun 2011 – 2013 diperoleh

		perusahaan daerah air minum tirta randik kabupaten Musi Banyuasin	sampai dengan tahun 2013, menganalisis dengan menggunakan metode Varian	kesimpulan total pendapatan, biaya langsung usaha dan biaya tidak langsung usaha anggaran operasional pada PDAM Tirta Randik kabupaten Banyuasin masih dalam batasan pengendalian keuangan
5	Venna Maria, Jantje tinangon dan Novi S. Budiarto (2016)	Evaluasi penerapan system pengendalian penerimaan kas (study kasus pada dinas pendapatan daerah Kota Manado	Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel dan transparan, dinas Kota Manado melaksanakan system pengendalian penerimaan kas untuk mengontrol jalan pelaporan penerimaan kas dan kegiatan lainnya. Penerapan system pengendalian penerimaan kas pada dinas pendapatan daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan
6	Weda ayu margareta dan Ikhsan budi riharjo (2015)	Kesiapan instansi pemerintah dalam implementasi standar akuntansi pemerintah basis akrual	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf bagian keuangan sekretariat DPRD Provinsi Jawa timur sudah cukup siap dalam penerapan SAP basis akrual, hal tersebut telah terbukti dengan staf keuangan sekretariat DPRD Provinsi Jawa timur melakukan bimbingan teknis atau pelatihan dari BPKAD, dan mengikuti berbagai <i>workshop</i> mengenai implementasi SAP Basis Akrual.
7	Billy rivaldy, sifrif S, dan Jessy D.L Warongan	Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah pada Dinas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa	Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif	Hasil penelitian menggambarkan bahwa system akuntansi pemerintah pada dinas pendapatan daerah

	(2016)	Tenggara		kabupaten Minahasa tenggara berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perlu adanya penggantian nama akun pada laporan perubahan ekuitas.
9	Gerarldez G, Wiston Pontoh, dan Victorina Z. Tirayoh (2016)	Analisis system dan prosedur penerbitan surat perintah membayar uang persediaan (SPM-UP) pada dinas pekerja kota Bitung	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil yang diperoleh prosedur penerbitan surat pembayar uang persediaan (SPM-UP) pada dinas umum kota Bitung penerapannya belum sesuai dengan karakteristik pedoman pengelolaan keuangan daerah menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
10	M.Dimas satrio, Indrawati Yuhertina, dan Ardi Hamzah (2016)	Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Jombang	Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pimpinan dan pegawai SKPD. Data analisis dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan interaktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan beserta jajaran SKPD memiliki komitmen dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Namun masih terdapat kendala yang mesti diperbaiki dan mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Jombang.

H. Kerangka Pikir

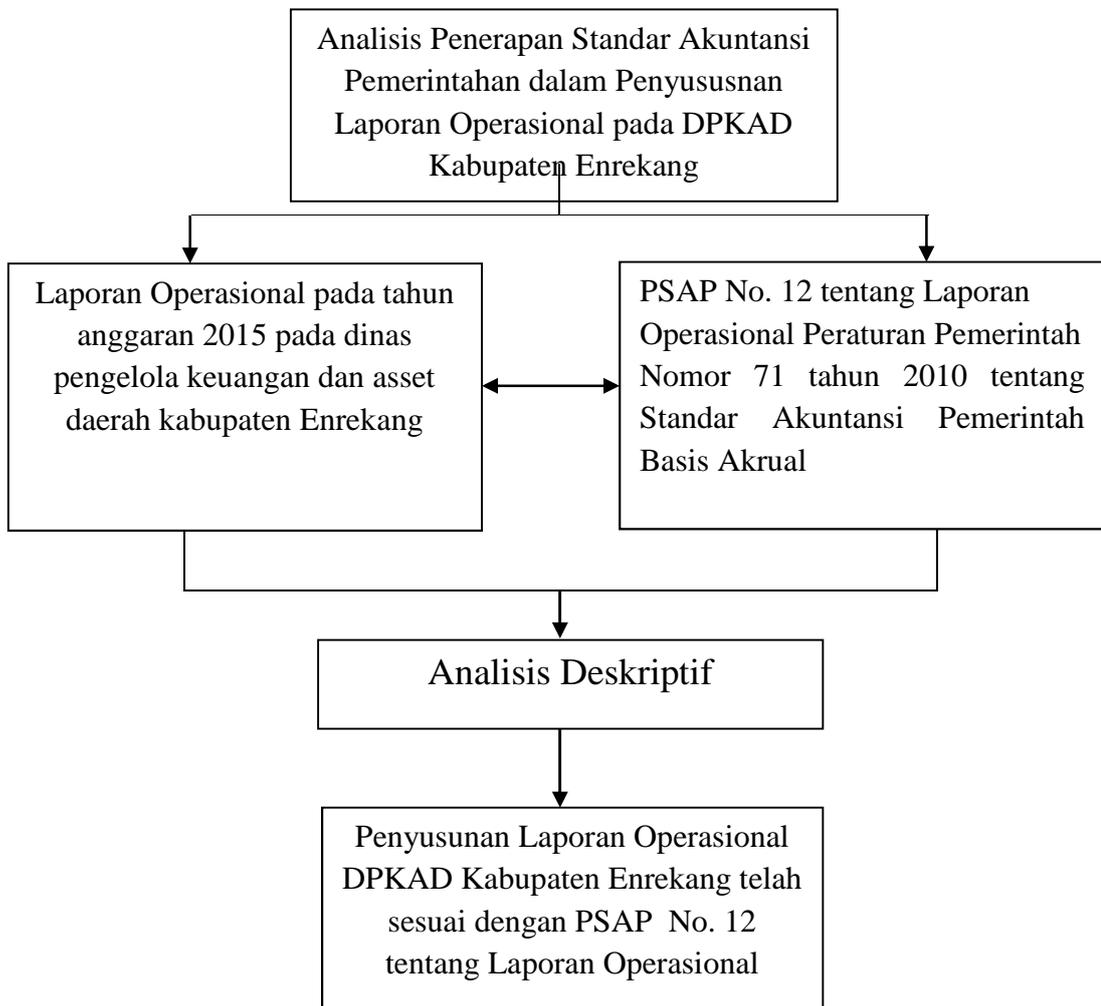
Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah sehingga adanya otonomi daerah yang meningkatkan kemandirian pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal itu mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Akuntansi sektor publik dengan penerapan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual merupakan pedoman pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Pencatatan transaksi itu diihtisarkan menjadi sebuah Laporan Operasional yang dalam penyusunannya dilakukan oleh semua SKPD, tak terkecuali pada Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.

Untuk mengetahui sejauh mana DPKAD Kabupaten Enrekang telah menerapkan PSAK Nomor 12 tentang Laporan Operasional Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual, maka perlu diadakan analisis mengenai masalah penerapan standar akuntansi

pemerintahan dalam penyusunan laporan operasional pada Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dengan melihat pada tahun anggaran 2015 karena semua entitas pelaporan dan entitas akuntansi diwajibkan menyusun laporan operasional berdasarkan PSAP No. 12 dan ketentuan dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 36 ayat (1), mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5(lima) tahun, dan jika mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 maka semua SKPD harus menggunakan atau menerapkan PSAP No.12 tentang Laporan Operasional pada tahun 2015. Maka dari itu teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis laporan operasional PSAP No.12 dan tahun anggaran 2015 laporan operasional pada DPKAD Kabupaten Enrekang adalah metode analisis deskriptif (*Deskriptif Analisis method*) yaitu suatu metode yang menggambarkan terlebih dahulu mengenai pencatatan, pengakuan serta pelaporan pendapatan dan beban pada Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang kemudian disesuaikan dengan PSAP No.12 tentang Laporan Operasional.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



I. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dirumuskan suatu hipotesis. Dimana Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAP No.12 yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah dalam Laporan operasional Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015.

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang Beralamat di jln. Jendral Sudirman No.1 Enrekang, Sulawesi selatan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh berupa informasi dari hasil melalui wawancara berupa pencatatan, pengakuan dan pelaporan beban Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang baik dalam bentuk informasi secara lisan maupun secara tertulis.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang diteliti dalam bentuk angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan yang lebih lanjut berupa Laporan Operasional pada tahun anggaran 2015.

2. Sumber Data

sementara sumber data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan beserta stafnya yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen-dokumen dan buku literature serta laporan tertulis diluar perusahaan yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini yaitu :

- a. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang terkait dengan laporan operasional untuk tahun anggaran 2015.
- b. Dokumentasi melauai teknik pengumpulan data berupa dokumen organisasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

D. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif (*Descriptive Analisis Method*). Metode analisis deskriptif yakni suatu metode yang memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai Laporan Operasional pada

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, lalu disesuaikan dengan PSAP No.12 tentang Laporan Operasional.

E. Definisi Operasional

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah entitas akuntansi yang diwajibkan menyusun laporan operasional untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebuah standar dalam penetapan dasar-dasar penyajian laporan keuangan untuk pemerintah dalam rangka memenuhi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
3. Laporan Operasional adalah penyajian ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Beban-LO dari kegiatan operasional. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas yang dapat merupakan pengeluaran konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

- c. Transfer adalah pengeluaran atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Surplus/deficit dari kegiatan Non Operasional, bila ada
- e. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- f. Surplus/defisit-LO, dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional entitas pelaporan harus dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Dalam rangka memperlancar Penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan kewenangan membentuk beberapa lembaga Pemerintah Kabupaten Enrekang sesuai dengan kebutuhannya.

Penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan adanya perubahan selain merupakan tuntutan yang mengharuskan pemerintahan yang lebih responsive ,transparan dan akuntabel, juga dipengaruhi oleh berbagai fenomena dan desakan kebutuhan seiring dengan perkembangan dinamika pelayanan publik dalam upaya mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta upaya mengoptimalkan kinerja pemerintah di daerah.

Salah Satu Lembaga Pemerintah Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah antara lain adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang yang pembentukan

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Enrekang, lembaga ini berkedudukan sebagai salah satu perangkat daerah otonomi Kabupaten Enrekang dituntut adanya Pengelolaan Keuangan daerah lebih maksimal sehingga diperlukan menyusun rencana strategik dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal . Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Enrekang melalui Sekretaris Daerah. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelola keuangan dan Asset Daerah dengan keputusan Bupati Enrekang.

Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah disamping sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang didalamnya terdapat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selaku Unit Kerja Pengelola dan Bergulir. Kepada SKPKD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Selaku Bendahara Umum Daerah memiliki peran sangat strategis dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.

B. Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

1. Visi

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan kedepan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan kearah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tujuan masyarakat akan pelayanan prima sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan, perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertaha, terencana,konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan atau manfaat.

Visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah ” *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang efisien,efektif, akuntabel dan transparan* ”

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh Pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Badan pengelola Keuangan daerah Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Enrekang secara khusus dan penyelenggaraan Negara secara Umum. Misi sesuai dengan tugas pokok dengan memperhatikan masukan pihak –pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi, oleh karena itu Misi Badan pengelola Keuangan daerah Kabupaten Enrekang adalah

“Mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh penatausahaan yang tertib serta meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah”.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi yang telah disepakati atau ditetapkan maka akan dilaksanakan program sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan disiplin Aparatur.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan.
6. Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran.

7. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah.
8. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. *Tujuan*

Tujuan yang merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan.tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi.Misi serta didasarkan pada isi-isu dan analisis stratejik. Dan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Tujuan diharapkan dapat mengarahkan pada rumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah

”Menghasilkan rumusan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah demi terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dengan pengendalian keuangan daerah dan administrasi yang mantap ”.

4. Strategi

Untuk menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan menyebarkan misi BPKD, perlu dilakukan analisis lingkungan strategi (Analisa lingkungan internal dan External) Untuk itu langkah – langkah untuk mencapai tujuan :

- a. Diharapkan Dapat menguasai Tugas pokok dan fungsi dari masing – masing bidang.
- b. Diharapkan adanya kerja sama antar Bidang dan sub bidang.
- c. Sarana dan prasarana administrasi dalam pengelolaan keuangan memadai.
- d. Peraturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan tersedia.
- e. Diharapkan supaya terciptanya budaya dan motivasi kerja yang tinggi

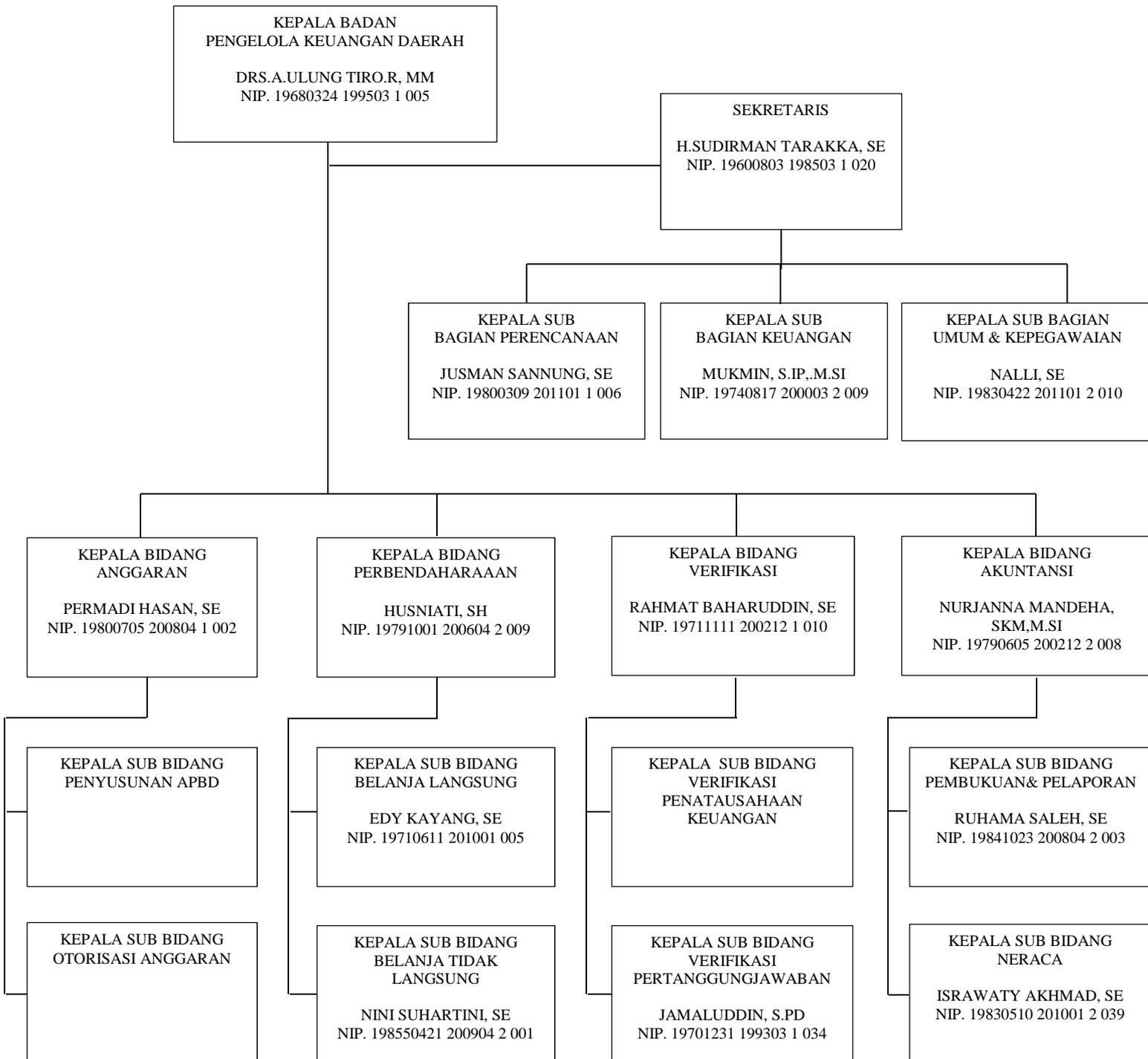
C. Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.

Organisasi yang diorganisir dengan baik dapat merealisasikan tujuannya apabila didalamnya terdapat struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Agar tujuan organisasi dapat tercapai maka efisiensi dan efektifitas kinerja perlu ditingkatkan melalui suatu pembagian kinerja terhadap pegawai sehingga dapat mengetahui tugas dan tanggungjawabnya.

Struktur organisasi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada skema berikut.

Bagan 4.1 Skema Struktur Organisasi

PERDA NO. 11 TAHUN 2016
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAH KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ENREKANG



D. Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

1. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

- a. Kepala dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan dibidang keuangan dan aset daerah dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
 2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
 4. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja DPKAD
 5. Mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja setiap unit kerja dll.

2. Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

- a. Sekretaris DPKAD mempunyai tugas menatausahakan seluruh kegiatan operasional Dinas pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Sekretaris DPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
 2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
 3. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
 4. Mengkoordinasikan RKA dan DPA dalam lingkup DPKAD kepada pimpinan.
 5. Mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan perlengkapan, dan anggaran dalam lingkup DPKAD baik pembelanjannya penggunaannya, pembukuannya dan pelaporan.

3. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi dalam lingkungan Dinas Pengelola Keuangan dan Asset daerah dan membantu pejabat dalam memperlancar kegiatannya.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kebutuhan peralatan / perlengkapan dalam lingkungan DPKAD, menggunakannya sesuai ketentuan, membukukannya, dan melaporkannya.
 2. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) DPKAD.

3. Membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai DPKAD.
4. Menerbitkan keputusan kenaikan gaji berkala pegawai DPKAD yang telah memenuhi syarat.
5. Menjaga ketertiban dan kebersihan kantor DPKAD.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan

- a. Kepala sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan pengembangan DPKAD dan Merencanakan Anggaran DPKAD.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana anggaran satuan dan dokumen anggaran satuan kerja DPKAD.
 2. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
 3. Membuat telaahan staf kepada atasannya.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya.
 5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

5. Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaporkan Pengendalian Administrasi keuangan DPKAD.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
3. Melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pada DPKAD.
4. Menyusun dan melaporkan kegiatan DPKAD setiap bulannya.
5. Melakukan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan DPKAD

6. Kepala Bidang Perbendaharaan

a. Kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melakukan pembayaran, mencatat dan melaporkan setiap pengeluaran yang telah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

b. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
3. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
4. Mengeluarkan dan membukukan setiap pengeluaran kas daerah setelah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
5. Membuat daftar penguji dan SP2D.

7. Kepala Bidang Anggaran.

a. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyampaikan arah dan kebijakan umum APBD kepada setiap satuan kerja, mengkoordinasikan penyusunan RKA dan perubahannya oleh tim anggaran Eksekutif, mempersiapkan RAPBD dan melakukan revisi APBD sesuai persetujuan DPRD serta menyusun DPA.

b. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
3. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa dan meneliti bahan, data dan informasi untuk setiap unit kerja dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA).
5. Menjami kebenaran bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan anggaran penadapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

8. Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi

a. Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan verifikasi setiap penerimaan dan pengeluaran,

membukukan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD.

- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Memeriksa dan menyetujui konsep laporan keuangan dan perhitungan APBD.
 2. Menyiapkan informasi keuangan sesuai kebutuhan atasan
 3. Membantu kelancaran pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal.
 4. Melaksanakan rekonsiliasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran antar bidang dalam lingkup BPKD dan Pemegang Kas daerah.
 5. Memeriksa kebenaran usulan anggaran kas bulanan dan penyesuaian terhadap realisasinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh DPKAD Kabupaten Enrekang menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Sebagaimana program aplikasi komputer yang lain, aplikasi ini memberikan banyak otomatisasi pekerjaan penyusunan laporan keuangan. Dengan otomatisasi ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan/ fungsi akuntansi pada DPKAD Kabupaten Enrekang hanya perlu mencatat transaksi dalam beberapa kertas kerja (work sheet).

Pencatatan transaksi dibagi menjadi empat jenis, yaitu Jurnal Umum (kode JU), Jurnal Penyesuaian (JP), Jurnal Penutup LRA (kode CL) dan jurnal penutup (kode CO). Pencatatan transaksi untuk setiap akun yang di Debet dan akun yang di Kredit hanya perlu diisi dengan nomor akun, selanjutnya nama akun akan terisi secara otomatis. Nama akun yang telah terisi, secara otomatis pula, akan menghasilkan buku besar (general ledger) setiap akun, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian serta laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh DPKAD Kabupaten Enrekang merupakan *output* (keluaran) dari *input* (masukan) berupa bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen seperti Surat Perintah Pencairan Dana langsung (SP2D -LS), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum atau formulir lainnya.

2. Akuntansi Pendapatan-Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang selama tahun anggaran 2015. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang memiliki sumber-sumber pendapatan, pencatatan di bendahara penerimaan pendapatan-LO seperti pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan transper, dan lain-lain pendapatan yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain PAD yang sah. Pencatatan PAD ini dijelaskan sebagai berikut :

b. Pencatatan pendapatan pajak daerah

Pencatatan pendapatan pajak daerah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang menggunakan kode JU (jurnal umum). Pencacatan jurnal hanya dilakukan dengan menggunakan kode akun yang

akan di “Debet” dan “Kredit”. Namun akun yang bersangkutan akan muncul secara otomatis. Sebagian jurnal yang dicatat sehubungan dengan pendapatan pajak daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah :

Pada tanggal 13 Februari 2015, bendahara penerimaan Dinas pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) Sebagai ketetapan atas PBB Tahun 2015 sebesar Rp.2.500.000,- (pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya *penetapan terlebih dahulu*). Dan pada tanggal 13 juli 2015, wajib pajak melakukan pembayaran atas PBB sebesar Rp.2.500.000,-(pencatatan - *saat diterima pembayaran*). Dan pada tanggal 14 juli 2015, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan PBB yang diterimah ke Kas Daerah sebesar Rp.2.500.000,- (pencatatan- *penyetoran pendapatan ke Kas Daerah*)

Berdasarkan bukti informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi pendapatan-LO Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang mencatat dengan jurnal sebagai berikut :

JURNAL-LO atau Neraca

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	Debit	Kredit
13/02/2015	SPPT	1.1.3.01.15	Piutang PBB	2.500.000	
		8.1.1.06.01	Pendapatan PBB-LO		2.500.000
13/07/2015	SSP/ Nota Kredit	1.1.1.02.01	Kas di bendahara penerimaan	2.500.000	
		1.1.3.01.15	Piutang PBB		2.500.000

14/07/2015	SSP	3.1.3.01.01	RK-PPKD	2.500.000	
		1.1.1.02.02	Kas di bendahara penerimaan		2.500.000

c. Pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah

Sebagian jurnal yang dicatat sehubungan dengan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah :

Pencatatan Retribusi daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu adalah :

Tanggal 1 Mei 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp.48.000.000,00. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi DPKAD mencatat dengan jurnal:

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	Debit	Kredit
01/05/2015	SKRD	1.1.3.02.15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.000.000	
		8.1.2.15.01	Pendapatan sewa Tanah dan Bangunan – LO		48.000.000

d. Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan oleh DPKAD Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

Tanggal 5 Januari 2015, PPKD menerima hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pembagian deviden untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.387.902.299,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	Debet	Kredit
31-01-15	Nota kredit/ TBP/ Doku-men yang di-persamakan	1.1.1.01.01	Kas di kas daerah	3.387.902.299	
		1.1.3.03.03	Piutang Bagian Laba Perusahaan Swasta		3.387.902.299

e. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang pada laporan operasional yang berakhir pada 31 desember 2015 sebesar Rp.27.497.305.839,00

3. Pengakuan Pendapatan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Enrekang

Pengakuan pendapatan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Enrekang. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); yang diantaranya pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer; yang diantaranya transfer dari pemerintah pusat - dana perimbangan : termasuk dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ; diantaranya pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

4. Pelaporan Pendapatan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Enrekang

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Enrekang mencatat jumlah pendapatan yang berakhir pada 31 desember 2015 Sebesar Rp.924.260.996.861.02 yang terdiri dari PAD Sebesar Rp.53.613.294.839,02, pendapatan transfer sebesar Rp.864.593.294.839.02 dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp.6.054.291.529,02

5. Pencatatan Beban pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang memiliki beban yang terdiri dari Beban Operasi diantaranya beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban beban perjalanan dinas, beban bantuan social, dan beban penyisihan piutang dan Beban Transfer yang diantaranya beban transfer bantuan keuangan ke desa.

a. Pencatatan Beban Operasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Enrekang

1. Pencatatan Beban Pegawai

Pencatatan beban pegawai pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang menggunakan kode JU (Jurnal Umum). Pencatatan jurnal hanya dilakukan dengan memasukan kode akun yang akan di”Debet” dan yang akan di “Kredit”, nama akun yang bersangkutan

akan muncul secara otomatis. Sebagian jurnal yang dicatat sehubungan dengan beban pegawai pada DPKAD Kabupaten Enrekang adalah:

Pada tanggal 04/9/2015 Bendahara Pengeluaran menerima SP2D atas pembayaran gaji bulan Agustus sebesar Rp 127.837.000 dengan rincian sebagai berikut: Gaji pokok Rp 110.000.000, Tunjangan Keluarga Rp 12.000.000, Tunjangan Jabatan Rp 8.700.000, Tunjangan beras Rp 9.600.000, Tunjangan PPh Rp 3.270.000 . Dengan potongan: Iuran Wajib Pegawai Negeri Rp11.842.000, Tab. Perumahan Pegawai Rp 613.000, Pph. Pasal 21 3.278.000.

Maka berdasarkan bukti SP2D tersebut, PPK-DPKAD Kabupaten Enrekang akan mencatat jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Debet	Kredit
04/9/2015	3.1.3	R/K PPKD	127.837.000	
	1.1.1	Kas dibendahara pengeluaran		127.837.000
	1.1.1	Kas dibendahara pengeluaran	127.837.000	
	3.1.3	R/K PPKD (saat SP2D di SKPD)		127.837.000
	9.1.1	Beban Pegawai	127.837.000	
	3.1.3	Kas dibendahara pengeluaran (saat dibayarkan kepada pegawai)		127.837.000

2. Beban Barang dan Jasa

Pencatatan beban barang dan jasa menggunakan kode JU (Jurnal Umum) pada saat pembelian barang dan jasa yaitu ATK. Sedangkan jurnal penyesuaian sehubungan dengan beban barang dan jasa pada akhir periode akan terisi secara otomatis.

Sebagian jurnal yang dicatat oleh PPK – DPKAD Kabupaten Enrekang sehubungan dengan beban barang dan jasa adalah:

Pada tanggal 31/12/2015, total pemakaian barang dan jasa adalah senilai Rp 79.105.067.270,00 berdasarkan *stock opname*, maka jurnal yang dicatat oleh PPK-DPKAD Kabupaten Enrekang adalah:

Tanggal	Akun	Uraian akun	Debet	Kredit
31/12/2015	9.1.2	Beban barang dan jasa	79.105.067.270	
	1.1.2	Persediaan		79.105.067.270

3. Beban Transfer

Beban transfer Bantuan keuangan ke Desa

Pada tanggal 10 januari 2015 DPKAD menerbitkan SK pemerintah kabupaten Enrekang tentang transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp.48.128.912.255,00.

Dan pada tanggal 25 maret 2015 PPKD menerbitkan SP2D-LS sebesar Rp. 48.128.912.255,00 dan dibayarkan kepada penerima bantuan.

Fungsi akuntansi PPKD mencatat :

Tanggal	No Bukti	Kode Rek	Uraian	Debet	Kredit
10/1/2015	Xxx		Beban transfer bantuan ke Desa	48.128.912.255	
			Utang transfer bantuan keuangan ke Desa		48.128.912.255
25/3/2015	Xxx		Utang transfer bantuan keuangan ke Desa	48.128.912.255	
			Kas di kas daerah		48.128.912.255
	Xxx		Belanja transfer bantuan keuangan ke Desa	48.128.912.255	
			Perubahan SAL		48.128.912.255

6. Pengakuan Beban pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Pengakuan Beban pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang meliputi :

1. Beban Operasi adalah beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasi diantaranya ; beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban

perjalanan dinas, beban bantuan social, beban penyisihan utang dan beban lain-lain.

2. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan transfer oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, meliputi ; beban transfer bantuan keuangan ke desa.

7. Pelaporan Beban pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang mencatat seluruh beban pada 31 desember 2015 sebesar Rp.642.364.086.431,39 meliputi beban operasi sebesar Rp.594.235.156.176,39 dan beban transfer sebesar Rp.48.128.912.255,00. Sedangkan total keseluruhan pendapatan sebesar Rp. 924.260.996.861.02. sehingga terjadi surplus dari operasi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang untuk tahun anggaran yang berakhir 31 desember 2015 adalah sebesar Rp.261.696.926.430,30.

8. Pihak dan Dokumen yang terkait dengan akuntansi beban pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

a) Beban Pegawai

Pihak yang terkait dengan akuntansi beban pegawai pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah :

1. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang
2. Kuasa BUD
3. Bendahara pengeluaran dan PPK-DPKAD

Dokumen yang digunakan sehubungan dengan akuntansi beban adalah :

1. Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh bendahara pengeluaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang
2. SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana-Langsung)

b) Beban Barang dan Jasa

Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi beban barang dan jasa antara lain adalah :

1. Penyimpanan barang
2. Bendahara Pengeluaran dan PPK-DPKAD

Sedangkan dokumen yang digunakan sehubungan dengan akuntansi persediaan adalah

1. Bukti belanja persediaan
2. Berita acara serah terima barang
3. Berita acara *stock ofname* akhir tahun dan SP2D-LS

c) Beban transfer bantuan keuangan ke Desa

Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi beban transfer antara lain

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan DPKAD (PPK-DPKAD)
2. Bendahara Pengeluaran DPKAD

Sedangkan dokumen yang digunakan dalam akuntansi beban transfer adalah :

1. Bukti-bukti transaksi transfer yang sah dan valid ke buku Jurnal LRA dan buku jurnal-LO dan Neraca
2. Berita acara serah terima transfer
3. Bukti SPJ atas transfer

B. Pembahasan Penyusunan Laporan Operasional berdasarkan PSAP No.12.

1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PSAP No.12

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh DPKAD Kabupaten Enrekang menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Sebagaimana program aplikasi komputer yang lain, aplikasi ini memberikan banyak otomatisasi pekerjaan penyusunan laporan keuangan. Dengan otomatisasi ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan/ fungsi akuntansi pada DPKAD Kabupaten Enrekang hanya perlu mencatat transaksi dalam beberapa kertas kerja (work sheet).

Pencatatan transaksi dibagi menjadi empat jenis, yaitu Jurnal Umum (kode JU), Jurnal Penyesuaian (JP), Jurnal Penutup LRA (kode CL) dan jurnal penutup (kode CO). Pencatatan transaksi untuk setiap akun yang di

Debet dan akun yang di Kredit hanya perlu diisi dengan nomor akun, selanjutnya nama akun akan terisi secara otomatis. Nama akun yang telah terisi, secara otomatis pula, akan menghasilkan buku besar (general ledger) setiap akun, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian serta laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

a. Jurnal

Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi - transaksi keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dengan menyebutkan rekening yang didebet atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Jurnal merupakan sumber utama pencatatan ke perkiraan.

Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang tidak menggantikan peran perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat ke buku besar suatu perkiraan. Dengan bantuan jurnal, dapat memudahkan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencatat perkiraan sebab jurnal sudah memisahkan suatu perkiraan dalam debet dan kredit.

b. Posting ke Buku Besar

Langkah selanjutnya Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah mencatat jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing perkiraan. Posting meliputi proses memindahkan jumlah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit ke perkiraan buku besar yang bersangkutan. Posting buku besar dilakukan secara harian atau bulanan.

c. Neraca Saldo

Pada akhir periode akuntansi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/perkiraan buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo debit selalu sama dengan saldo kredit. Namun keseimbangan bukan berarti catatan-catatan telah akurat.

d. Jurnal Penyesuaian

Setelah neraca saldo, tahapan selanjutnya Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi atau untuk memisahkan antara beban dari suatu periode dengan periode yang lain.

e. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah jurnal penyesuaian dibuat, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya mem-postingnya ke perkiraan buku besar yang berhubungan. Setelah melakukan posting, selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru itu akan dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

f. Laporan Keuangan

Setelah neraca saldo setelah penyelesaian, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan yang dihasilkan diantaranya Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Neraca.

2. Pencatatan Pendapatan-LO dan Pencatatan Beban berdasarkan PSAP

No.12

a. Pencatatan Pendapatan-Laporan Operasional

1) Pencatatan pendapatan pajak daerah

Pencatatan pendapatan pajak daerah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang menggunakan kode JU (jurnal umum). Pencatatan jurnal hanya dilakukan dengan menggunakan kode

akun yang akan di “Debet” dan “Kredit”. Kas di bendahara penerimaan diDebet dan Piutang Pajak diKredit. Pencatatan transaksi ini berarti jika kas bendahara penerimaan bertambah dicatat diDebet dan piutang pajak berkurang diKredit. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ratmono bahwa persamaan akuntansi pemerintahan adalah :

$$\text{Aset} = \text{Hutang} + \text{Ekuitas} + (\text{Pendapatan-LO} - \text{Beban})$$

Berdasarkan persamaan tersebut, kas merupakan bagian dari asset, sedangkan beban adalah unsur pengurangt ekuitas.

2) **Pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah**

Sebagian jurnal yang dicatat sehubungan dengan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah : dengan menDebet Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan disisi Kredit Piutang Pendapatan Sewa tanah dan Bangunan-LO. Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dapat dijelaskan seperti pada rumus sebelumnya bahwa jika piutang retribusi bertambah maka akan di Debet karena akan menembaah ekuitas dan begitupun sebaliknya jika berkurang maka akan di kredit.

b. Pencatatan Beban

1) **Beban Pegawai**

Pencatatan beban pegawai yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah dengan menDebet

akun Beban Pegawai dan mengkredit akun Kas diBendahara Pengeluaran. Pencatatan transaksi ini berarti beban bertambah dicatat diDebet sedangkan kas berkurang dicatat diKredit. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ratmono bahwa persamaan akuntansi pemerintahan adalah:

$$\text{Aset} = \text{Hutang} + \text{Ekuitas} + (\text{Pendapatan} - \text{Beban})$$

Berdasarkan persamaan tersebut, kas merupakan bagian dari aset, sedangkan beban adalah unsur pengurangt ekuitas.

2) Akuntansi Beban Barang dan Jasa

Pencatatan atas konsumsi aset yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang pada akhir periode adalah dengan mendebet akun beban barang dan jasa dan mengkredit akun persediaan. Pencatatan yang dilakukan oleh DPKAD dapat dijelaskan seperti pada rumus sebelumnya bahwa beban barang/ jasa merupakan pengurang ekuitas sehingga jika bertambah akan dicatat pada sisi Debet, sedangkan persediaan merupakan bagian dari aset sehingga jika berkurang akan dicatat pada sisi Kredit.

3. Pengakuan Pendapatan-LO dan Pencatatan Beban berdasarkan PSAP No.12

a. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Enrekang. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); yang diantaranya pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer; yang diantaranya transfer dari pemerintah pusat - dana perimbangan : termasuk dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ; diantaranya pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

b. Pengakuan Beban

Pengakuan Beban pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang meliputi :

1. Beban Operasi adalah beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasi oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang diantaranya ; beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban bantuan social, beban penyisihan utang dan beban lain-lain.
2. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan transfer oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, meliputi ; beban transfer bantuan keuangan ke desa.
3. Selain itu, pengakuan beban juga dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang apabila terjadi penurunan manfaat ekonomi atas asset tetap.

Dengan demikian, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam penyusunan laporan operasional yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAP No. 12 yang menyatakan bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi sedangkan beban diakui pada saat terjadinya konsumsi aset dan

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa (PSAP No.12, Paragraf 32). Hal yang sama dikemukakan pula oleh Erlita bahwa Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan beban harus sudah diakui apabila entitas telah memperoleh manfaat ekonomi, terjadi konsumsi penggunaan aset dan terjadi penurunan manfaat ekonomi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian tentang focus permasalahan dalam penelitian tentang analisis penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan operasional pada dinas pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten Enrekang, Maka penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang untuk tahun anggaran 2015 telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan - LO dan beban - LO pada Dinas Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

B. Saran

Saran yang penulis ajukan sehubungan dengan selesainya penelitian ini adalah:

1. Hendaknya Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang mempertahankan prestasi yang telah diraih atau bahkan terus ditingkatkan lagi supaya terus tercipta tata kelola dengan baik terutama dibidang akuntansi sector public dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan agar dalam pemeriksaan serta pengawasan dapat berjalan dengan baik.
2. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebaiknya memberi bimbingan, pelatihan dan bersosialisasi sehubungan dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos. 2006. *Kamus Produksi dan Manajemen*. Jakarta : Citra Harta Prima.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Agoes, Sukrisno. 2013. *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akunntan Publik)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang. *Laporan Operasional tahun anggaran 2015-2016*. (15 Juli 2017)
- Erlina, Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan : Aksara.
- Gibson L, dkk. 1996. *Organisasi, Perilaku, Standard an Proses*. Jakarta : Bina Aksara.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jemy.2016. Analisis Pencatan dan Pelaporan Belanja Langsung dan Beban pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung. *Jurnal Universitas*. Kota Bitung, (15 Juni 2015).
- Karim, Abdul. 2015. *Penilaian Kinerja dalam Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik pada Pemerintah Kabupaten Enrekang*. *Jurnal Ilmiah AKSI STIE AMKOP*. Makassar, (1 September 2015).
- KSAP. 2010. *Impelmentasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Makalah Disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda. Jakarta, (25 Maret).

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : ANDI.
- Meliala, Tulis. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Dua*. Jakarta : Semesta Media.
- Munjiyah. 2011. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Konawe*. Jurnal Ilmiah Universitas Halu Oleo. Kendari, (23 November).
- Marliani, Ningsi. 2016. *Analisis Penyusunan Laporan Operasional (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe)*. Skripsi. Universitas Halu Oleo.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan : Aksara.
- , 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan Cetakan Pertama*. Jakarta: Fokusmedia.
- , 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ratmono, Dwi. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Riduwan. 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta.
- Setiawati, Kusuma. 2013. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Sudiaranti, Made. 2013. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Tesis. Universitas Udayana Bali.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Online : diakses 28 Maret 2016).